BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini standar akuntansi di Indonesia telah mengalami perubahan. Indonesia yang merupakan anggota G20 forum serta bagian dari IFAC (*International Federation of Accountant*) harus tunduk kepada SMO (*Statment Membership Obligation*). Hasil kesepakatan dari pertemuan negara-negara G20 forum yaitu menetapkan standar akuntansi keuangan yang dipakai secara internasional oleh negara-negara tersebut, yaitu IFRS (*International Financial Reporting Standards*). IFRS bertujuan untuk memudahkan proses rekonsiliasi bisnis antar lintas negara sehingga prinsip-prinsip akuntansi tidak akan terlalu berbeda. IASB (*Intenational Accounting Standard Board*) merupakan organisasi yang mengeluarkan IFRS. Selain itu, tuntutan globalisasi menjadi hal mengapa IFRS dibentuk agar persepsi-persepsi akuntansi di tiap negara sama dan juga menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai kredibilitas yang tinggi. Dengan maraknya perusahaan multinasional yang beroperasi di Asia menyebabkan tuntutan untuk menggunakan standar akuntansi yang sama dan berlaku secara internasional.

Dalam hal ini, Indonesia melakukan konvergensi dengan menyesuaikan standar akuntansi keuangan terhadap IFRS dan telah melakukan adopsi penuh

pada tanggal 1 Januari 2012 bedasarkan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Tahap-tahap konvergensi di Indonesia akan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Tahap Konvergensi IFRS di Indonesia

No	Tahap	Tahun	Keterangan
1.	Adopsi	2008 - 2011	IFRS di adopsi ke PSAK dengan cara persiapan infrastruktur yang diperlukan dan evaluasi terhadap PSAK yang berlaku.
2.	Persiapan Akhir	2011	Penyelesaian terhadap persiapan infrastruktur. PSAK sudah berbasis IFRS.
3.	Implementasi	2012	Penerapan PSAK secara bertahap. Lalu evaluasi.

Sumber: diolah penulis dari academia.edu dan iaiglobal.or.id

Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (Baridwan, 2002:3). Tujuan dengan menyediakan informasi laporan keuangan yang relevan dan handal akan menjadikan investor semakin tertarik. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang di dalamnya terdapat atauran-aturan tentang pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan juga penyajian.

PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) merupakan adopsi dari IAS 32 dan IAS 39 yang merupakan standar akuntansi keuangan internasional dan diterbitkan oleh IAI sebagi *exposure draft* (ED). PSAK tersebut merupakan salah satu instrumen keuangan yang didalamnya mengatur penyajian dan pengungkapan untuk PSAK 50 sementara PSAK 55 mengatur tentang pengakuan dan pengukuran. Diharapkan dengan di adopsinya PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) dapat terjadinya harmonisasi

dalam penyusunan dan analisis laporan keuangan serta meningkatkan keandalan, keterbandingan dan *representative fairfullness*.

PSAK 50 (2006) dan PSAK 55 (2006) merupakan salah satu PSAK yang direvisi untuk menyesuaikan dengan adopsi IFRS yang dilakukan di Indonesia dan menjadi fenomena yang menarik sebab dalam penerapannya pada sektor perbankan membuat Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atau penyisihan kerugian kredit harus menggunakan data historis selama tiga tahun kebelakang dan bersifat *principal based* (Emmanuela, 2012). PSAK 50 (revisi 2006) dan PSAK 55 (revisi 2006) tidak hanya berdampak pada perbankan saja, sektor keuangan lainnya seperti perusahaan asuransi, pembiayaan (*finance*), dan efek termasuk dalam PSAK ini. Menurut Caratri (2011) dalam penelitian Santy (2013) dengan menggunakan PSAK yang lama, bank dapat menumpuk cadangan yang besar karena penentuan cadangan memakai konsep ekspektasi kerugian kredit. Dengan konsep tersebut, bank dapat memakai celah untuk menghindari pajak dan laba dapat diturunkan dengan memakai pencadangan yang besar meskipun kualitas kredit tidak menghawatirkan. Peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan dapat direkayasa. Oleh karena itu, dengan direvisinya PSAK 50 (2006) dan PSAK 55 (2006) maka celah tersebut lebih diperketat agar meminimalisir perekayasaan laporan keuangan dan transparansi laporan keuangan akan meningkat.

Anggraita (2012) dalam penelitiannya menggunakan sampel 36 perbankan sebanyak pada periode 2009-2010 dan mengungkapkan bahwa terdapat penurunan setelah PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) di adopsi khususnya pada komponen CKPN

dalam proksi perhitungan manajemen laba. Hal tersebut sejalan dengan diharapkannya bahwa dengan penerapan PSAK ini, penurunan manajemen laba dapat diminimalisir dan diturunkan. Penelitian yang dilakukan oleh Santy (2013) menggunakan sampel sebanyak 31 perusahaan perbankan pada periode 2008-2011 dan mengungkapkan bahwa penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) sebelum dan sesudah diterapkan tidak menjamin penurunan manajeman laba di perbankan. Penelitian yang dilakukan oleh Santy (2013) ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rudra (2011) dengan memakai sampel perusahaan di India. Rudra (2011) menyatakan bahwa tidak ada penurunan dalam manajemen laba setelah diterapkannya IFRS.

Dari ketiga penelitian tersebut, penelitian yang disimpulkan berbeda sebab komponen akrual manajemen laba tidak hanya dihitung berdasarkan CKPN saja (Santy, 2013). Terdapat beberapa komponen akrual lainnya yang dapat menjadi pilihan manajemen dalam melakukan manajemen laba dibandingkan dengan komponen *Non Performing Assets* (NPA) yang umum, contohnya pinjaman yang dihapusbukukan (*loans charge-offs*) atau pinjaman yang beredar (*loans outstanding*). Seperti dalam penelitian Anggraita (2012) yang menemukan bukti dalam Myer (1990), Betty dkk. (1995), dan Collins dkk. (1995) bahwa manajemen laba dilakukan dengan menggunakan pinjaman yang dihapusbukukan (*loans charge-offs*) untuk memenuhi kecukupan modal.

Tujuan dari manajemen adalah mendapatkan laba yang tinggi dikarenakan semakin tinggi labanya, maka manajer akan mendapatkan bonus yang lebih tinggi juga. Selain itu, dengan laba yang tinggi akan memungkinkan para investor lebih

tertarik untuk menginvestasikan uangnya dan juga mengetahui resiko dalam investasi tersebut. Hal ini memungkinkan para manajer untuk melakukan penyimpangan dalam menyajikan dan melakukan rekayasa laporan keuangan. Penyimpangan dan perekayasaan dalam menyajikan laporan keuangan tersebut dikenal sebagai praktik manajemen laba (*earning management*).

Manajemen laba adalah upaya untuk mengubah, menyembunyikan, dan merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan dengan mempermainkan metode dan prosedur akuntansi yang digunakan perusahaan (Sri Sulistyanto, 2008: 15). Schipper (1989) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu intervensi yang memiliki tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan eksternal demi mendapatkan keuntungan pribadi. Healy & Wahlen (1999) dan Dechow & Skinner (2000) menerangkan dua bentuk manajemen laba yang sering dilakukan oleh manajer, yakni manajemen laba akrual (*accrual earnings management*) dan manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil (*real activities management manipulation*). Manajer menggunakan dua bentuk manajemen laba untuk memenuhi target penerimaan atau kinerja tertentu yang dibebankan kepada mereka (Roychowdury, 2006; Cohen et al. 2008). Menurut Cohen & Zarowin (2010) manajemen laba akrual tidak memiliki konsekuensi langsung pada arus kas perusahaan, sementara manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil memiliki konsekuensi langsung pada arus kas perusahaan. Sedangkan menurut *National Association of Certified Fraud Examiners* (1993) dalam Hairu (2009:22) mengartikan “Manajemen Laba” yaitu :

> Manajemen laba adalah kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan mengenai fakta material atau data akuntansi sehingga

> menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk membuat pertimbangan yang akhirnya akan menyebabkan orang yang membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat atau keputusannya.

Kasus manajemen laba yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus Lippo Bank yang melibatkan perusahaan afiliasi Lippo Grup (PT Bukit Sentul Tbk, PT Lippo Karawaci Tbk, PT Lippo Cikarang Tbk, PT Lippo Securities Tbk, PT Hotel Prapatan Tbk, dan PT Panin Insurance) serta perusahaan sekuritas yang mempunyai kedekatan dengan kelompok tersebut pada tahun 2002. Dalam praktiknya, perusahaan tersebut menerbitkan versi laporan keuangan yang berbeda-beda sehingga menimbulkan polemik dan kontroversi. Pertama, pada laporan keuangan per 30 September 2002 yang disampaikan ke publik pada 28 September 2002 disebutkan total aktiva perseroan Rp 24 triliun dan laba bersih Rp 98 miliar. Kedua, dalam versi laporan keuangan kepada BEI pada 27 Desember 2002 dengan total aktiva perusahaan berubah menjadi Rp 22,8 triliun (turun Rp 1,2 triliun) dan perusahaan merugi bersih Rp 1,3 triliun. Akibat dari perbedaan laporan keuangan tersebut, penurunan tingkat kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR) dari 24,77 menjadi 4,23% sehingga banyak pihak menduga bahwa apa yang dilakukan oleh Lippo Grup dan afiliasinya merupakan manipulasi yang dilakukan oleh manajemen.

Kasus lainnya yang masih melibatkan Lippo Grup terjadi sebelumnya pada tahun 2000 dimana pada saat itu PT Lippo Life mengubah bisnis inti perusahaannya yang berbasis perusahaan asuransi menjadi *dot com company* sehingga investor memburu saham tersebut yang membuat harga saham perusahaan tersebut naik dengan sangat tinggi (*panic buyer*). Investor yang

membeli saham tersebut berharap mendapat keuntungan yang tinggi, namun manajemen melalui prusahaan sekuritas beserta brokernya justru melakukan aksi jual besar-besaran yang mengakibatkan investor rugi besar dan sebaliknya manajemen mendapat keuntungan yang luar biasa. (Sumayanto, 2003).

Dengan diterbitkannya PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) yang bersifat *principle based* dapat meminimalisir bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba. Anggraita (2012) dalam penelitiannya merujuk pada penelitian Rudra (2011) yang melakukan penelitian terhadap sektor perbankan dan keuangan di India. Penelitian yang berfokus pada penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) masih sedikit dilakukan. Anggraita (2012) dan Rudra (2011) dalam penelitian yang dilakukan mengambil sampel perbankan karena seperti yang diketahui PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) lebih banyak berdampak pada sektor perbankan. Menurut Emmanuela (2012), penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) berdampak pada CKPN yang menggunakan data historis tiga tahun kebelakang dan bersifat *principal based*. Namun tidak hanya di sektor perbankan saja PSAK ini diterapkan, lembaga keuangan lainnya seperti pembiayaan (*finance*), asuransi, dan perusahaan efek dipengaruhi oleh PSAK 50 dan 55 (revisi 2006).

Belum banyaknya penelitian yang meneliti apakah ada pengaruh pergantian standar akuntansi ke PSAK 50 dan 55 (2006) terhadap manajemen laba memotivasi penulis untuk melakukan penelitan tersebut. Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan keuangan non bank di Indonesia yang melakukan *go public* di BEI. Untuk itu, penulis mengambil judul:

"Pengaruh Penerapan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) Terhadap Manajemen Laba (Studi pada Perusahaan Keuangan Non-Bank yang *Listing* di BEI).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) bagi perusahaan keuangan non bank yang *listing* di BEI untuk melakukan manajemen laba.
2. Seberapa besar tingkat perbedaan sebelum dan sesudah setelah penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) bagi perusahaan keuangan non bank yang *listing* di BEI dalam melakukan manajemen laba.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud

Maksud dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memberikan gambaran dan pemahaman mengenai penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) bagi perusahaan keuangan non bank yang *listing* di BEI untuk melakukan manajemen laba.
2. Untuk memberikan gambaran dan pemahaman tingkat perbedaan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) bagi perusahaan keuangan non bank yang *listing* di BEI untuk melakukan manajemen laba.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan skripsi ini agar:

1. Untuk mengetahui apakah penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) bagi perusahaan keuangan non bank yang *listing* di BEI untuk melakukan manajemen laba.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat tingkat perbedaan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) bagi perusahaan keuangan non bank yang *listing* di BEI dalam melakukan manajemen laba.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Pengembangan Ilmu

   Memberikan pengetahuan dan wawasan, sehingga memberikan masukan dalam mengembangkan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan judul yang diangkat oleh penulis
2. Penulis

   Untuk menambah pemahaman dan pengetahuan mengenai penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) terhadap praktik manajemen laba.
3. Peneliti Selanjutnya

Digunakan untuk menjadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian akan penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) terhadap praktik manajemen laba.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis yang diharapkan bagi manajemen perusahaan keuangan non bank dalam menyusun penelitian ini adalah dapat memberikan masukan yang positif bagi pengguna laporan keuangan perusahaan keuangan non-bank bahwa terdapat hubungan antara penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan keuangan non-bank di Indonesia.